

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. ed. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Budiarsih. 2020. Tindak Pidana Khusus. Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Djayeng Tirta. 2011. implementasi kewaspadaan terhadap korupsi di lingkungan aparaturnya pemerintahan guna menumbuhkan kesadaran hukum dalam rangka ketahanan nasional. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Djimas Samosir dan Timbul Andes Samosir. 2021. Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana. 2024. Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Edwin Triuwono. 2019. Laporan Keuangan Desa : Sebuah Tinjauan (Village Financial Statement : A Review). Paper SSRN. Universitas Atma Jaya Makassar.
- Emy Rosna Wati. dan Abdul Fatah. 2020. Hukum Pidana, Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Fitriani Wahyuni. ed. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Ismu Gunadi Widodo dan Jonaedi Efendi. 2011. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK
- Muhammad Rusli. 2019. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: UII Pres.
- Muhamad Mu'iz Raharjo. 2020 Pengelolaan Dana Desa. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.
- Muhammad Aenur Rosyid. 2021. Buku Ajar Hukum Pidana. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Mangihut Siregar. 2023. AntiKorupsi. Surabaya: UWKS PRESS.
- Muhamad Zainul. 2024. Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik). Jakarta SeLATAN: Publica Indonesia Utama.
- Nasruddin Umar. 2019. Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana. Ambon: LP2M IAIN Ambon.

P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2023. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Tofik Yanuar Chandra. ed. 2022. Hukum Pidana. Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 & Perpres RI Tahun 2012 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Bandung: Citra Umbara.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Andi Cakrawala Santoso. 2021. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada Di Kota Makassar (Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks.). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ardi Bonatua. 2021. Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Nomor 880 K/Pid/2019) Skripsi. Fakultas hukum Universitas Jayabaya.

Hiskia Meliala. 2019. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Quality.

Prengki Alexander. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi (studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Medan). Skripsi. Universitas Medan Area.

Rahmat Islam. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN Makassar No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks). Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Anselmus S. J. Mandagie. 2020. Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Volume 9 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Aryo Fadlian. 2020. Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. Jurnal Hukum POSITUM. Volume 5 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Amanda Yulia Damayanti. ed al. 2023. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, serta Pertanggungjawaban. Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen. Volume 1 Nomor 3. Universitas Tidar.

Anita dan Moch Iqbal. 2024. Analisis Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Seluma: Dampak Kerugian Negara dan Strategi Pemberantasan. Jurnal Social Pedagogy. Volume 5 Nomor 1. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

BPK RI. 2018. *Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.*

- Barry Franky Siregar. 2016. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bagus Oktafian Abrianto. et al. 2023. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice. Jurnal Plaza Hukum Indonesia. Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Deti Rahmawati. et. al. 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Volume 4 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Endri. et.al. 2020, proporsionalitas putusan hakim berdasarkan ide keseimbangan, Jurnal Selat. Volume 7 Nomor 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kepulauan Riau.
- Enny Sumarlin. 2023. Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat, Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam. Volume 9 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolingg.
- Fransiska Novita Eleanora. 2012. Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan. Hukum dan Dinamika Masyarakat. Volume 9 Nomor 2.
- Frans Simangunsong. 2014. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. RECHTSTAAT. Volume 8 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
- Harly Clifford Jonas Salom dan Judy Marria Saimima. 2023. *Tindak Pidana Korupsi dan Alokasi Dana Desa*. Matakao Corruption Law Review. Volume 1 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Patimura.
- Ismail. 2018. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam. Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Samudera-Lansa Aceh.
- Irfan Setiawan dan Cristin Pratami Jesaja. 2022. Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). Jurnal Media Birokrasi. Volume 4 Nomor 2. Institut Pemerintah Dalam Negeri.
- Joejoen Tjahjani. 2017. *Akibat Hukum Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID.B/2013/PN.Unh)*. Jurnal Independent Volume 5 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.
- Oktavia Esterlita Raranta. et al. 2020. Kajian yuridis terhadap penerapan pasal 382 BIS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perbuatan Curang, Lex Crimen. Volume 9 Nomor 2.
- Rantika Safitri. 2022. Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya). Jurnal Petitum. Volume 2 Nomor 1. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Yunes Prawira Darma. et al. 2024. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye. UNES Jurnal Of Swara Justisia. Volume 7 Nomor 4. Universitas Ekasakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Sumber Internet

BPK Perwakilan Sulawesi Selatan. Penyaluran Dan Pelaporan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/07/DANA-DESA_TH-revisi.pdf. hlm. 1-2. diakses pada 5 Desember 2024

Heylaw. 2021. Jenis-Jenis Tindak Pidana. <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana> diakses pada 11 november 2024.

- Hukum Online. 2023. Surat Dakwaan Tak Pakai Aturan Baru, Ini Akibatnya <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-tak-pakai-aturan-baru-ini-akibatnya-cl2963/> diakses pada sabtu, 1 februari 2025
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/palsu> diakses Rabu 6 November 2024.
- KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi ini. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini> diakses pada senin 5 vovember 2024.
- KPK: Pusat Edukasi Anti Korupsi, Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin> diakses pada senin 6 November 2024.
- Khairunas. Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power). Rektorat IAIN Pontianak. <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>. diakses pada Jumat 7 Februari 2025.